

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program perhutanan sosial telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor kehutanan sejak diundangkannya melalui UU No.41 tahun 1999 bahkan hingga saat ini yang telah mengalami revisi melalui UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021. Regulasi tersebut menjadi dasar penguatan implementasi program perhutanan sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Pemerintah kemudian melakukan terobosan baru yang berpihak pada masyarakat sekitar hutan pada tahun 2016 dengan diterbitkannya Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Sejak saat itu, skema-skema Perhutanan Sosial di Indonesia telah mencapai 11.065 unit izin dengan total luas 8.323.671 hektar. Skema-skema perhutanan sosial telah mencapai lima skema yang tercakup dalam peraturan ini antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Dusun (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemitraan (Dewi, 2018). Izin yang mencakup seluas 13,9 juta hektar (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial hektar (Rohmayanto et al., 2019).

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, perizinan Perhutanan Sosial telah mencapai 9.598 izin, dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai yang paling dominan, yaitu sebanyak 3.443 izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat dan partisipasi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan cukup tinggi (*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025*).

Walaupun demikian, ada fakta menarik. Hasil evaluasi capaian program Perhutanan Sosial secara nasional belum sepenuhnya sejalan dengan keberhasilannya di tingkat tapak. Berdasarkan buku hasil evaluasi program Perhutanan Sosial oleh KLHK (2021), ditemukan adanya ketimpangan antara jumlah izin yang diterbitkan dengan tingkat keberfungsian kelembagaan dan keberlanjutan pengelolaan di lapangan. Banyak kelompok masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas kelembagaan, pendampingan pasca izin, serta akses terhadap pembiayaan dan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian izin belum secara otomatis menjamin keberhasilan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: **mengapa banyak kelompok masyarakat telah memperoleh izin, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan dari program Perhutanan Sosial?**

Untuk memahami pertanyaan tersebut, salah satu *framing* analisis yang bisa dipakai motif, baik individu maupun masyarakat, berperan serta dalam suatu s Perhutanan Sosial, hal ini sangat menarik karena penelitian dengan : dalam bergabung dan berpartisipasi masih sangat kurang. Untuk ian ini mengambil suatu studi kasus di KTH Bontorannu, dusun en Gowa, yang merupakan salah satu kelompok pengelola hutan Perhutanan Sosial.



KTH Bontorannu dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki latar belakang sosial dan sejarah pembentukan kelompok yang unik. Kelompok ini terbentuk atas inisiatif pihak mitra yang terlebih dahulu datang menawarkan pengelolaan hutan pinus kepada masyarakat, kemudian mendorong pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui kepala dusun sebagai wadah legal untuk memperoleh izin pengelolaan perhutanan sosial. Proses tersebut menimbulkan interaksi antara kepentingan pihak mitra, masyarakat, dan pemerintah dusun, terutama dalam pembagian peran serta pengambilan keputusan pengelolaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini menunjukkan beragam motif, mulai dari keinginan memperoleh hak kelola, rasa kebersamaan, hingga kepercayaan terhadap pemimpin kelompok.

Dengan memahami motif masyarakat dalam berpartisipasi pada program Perhutanan Sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi program di tingkat tapak di tingkat tapak (lapangan), yaitu di kelompok masyarakat pengelola hutan yang menjadi penerima izin perhutanan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan strategi pendampingan serta kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

1.2. Landasan Teori

Pengelolaan hutan saat ini menerapkan sistem Perhutanan Sosial suatu sistem dimana pengelolaan hutan secara lestari dalam kawasan hutan negara maupun hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan (Rahayu dan Triwanto, 2021). Sistem pengelolaan hutan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif melalui wadah Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pengelolaan hutan (Fauzi, 2020).

Untuk mengelola kawasan perhutanan sosial secara efektif atau dikenal dengan istilah *good forest governance*, masyarakat petani membentuk kelompok tani hutan. Dalam pelaksanaannya, kelompok ini berfungsi sebagai pengorganisasi kepentingan para petani dan dituntut untuk memiliki kapasitas serta kapabilitas yang memadai, baik secara individu maupun secara kelembagaan (Purnama dan Sartika, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, perlu adanya pelibatan aktif masyarakat sekitar hutan. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan kawasan hutan.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, di mana masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Sistem ini menempatkan mereka sebagai subjek utama dalam an yang berbasis lokal (Witno et al., 2020). Dalam konteks ini, Skema n (HKm) menjadi salah satu bentuk implementasi dari perhutanan jara yang pemanfaatan kawasannya diberikan kepada masyarakat erdayaan dan peningkatan kesejahteraan (Rahayu dan Triwanto,



Tujuan dari sistem ini tidak hanya terfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada kelestarian fungsi hutan yang dikelola bersama masyarakat secara berkelanjutan. Karena itulah, dibutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme partisipasi yang ada dalam pengelolaan HKm. Berdasarkan Permenhut RI No.83/Menlhk/Sekjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, dinyatakan bahwa program ini merupakan program strategis nasional dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan yang berkelanjutan (Witno et al., 2020).

Dalam kerangka pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana alasan masyarakat disana tertarik untuk bergabung dalam perhutanan sosial, khususnya pada kawasan HKm Bontorannu yang menjadi lokasi penelitian ini. Hal tersebut penting, mengingat esensi dari kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan (Yeni et al., 2020).

Dengan demikian, penerapan pendekatan *core social motives* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami motif-motif dasar yang melatarbelakangi keputusan masyarakat Bontorannu untuk bergabung dalam program perhutanan sosial. Melalui kerangka ini, diharapkan dapat tergambarkan bagaimana aspek-aspek seperti kebutuhan untuk merasa memiliki (*belonging*), memperoleh pemahaman yang jelas (*understanding*), memiliki kendali terhadap sumber daya (*controlling*), meningkatkan harga diri (*self-enhancing*), serta membangun kepercayaan terhadap sesama anggota kelompok dan pihak pengelola (*trusting*), menjadi pendorong utama dalam motivasi mereka terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Geiger dan Brick, 2023). Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Core Social Motives dan Permasalahan Aksi Kolektif

(diadaptasi dari Fiske, 2004; Brick et al., 2021)

Motive	Ringkasan	Contoh Intervensi
Belong	Diterima dan menjaga hubungan sosial	Mendorong perilaku normatif dengan membuat konsumsi tinggi terlihat oleh orang lain
Understand	Mengintegrasikan informasi dan membentuk makna bersama	Mengomunikasikan ancaman yang mudah dipahami, bukan yang terlalu rumit
Control	Merasa kompeten dan efektif	Mengomunikasikan ancaman yang dapat dikelola, bukan ancaman eksistensial
Self-Enhance	Melihat diri sebagai pribadi yang bernilai dan baik	Menyoroti keinginan untuk dikenang secara positif sepanjang hidup (misalnya, Zaval et al., 2015)
	orang lain sebagai orang baik (<i>benevolent</i>)	Mengadopsi teknik dari pendekatan organisasi relasional (misalnya, Divakaran & Nerbonne, 2017)



Menurut Yuliani (2018), langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif melibatkan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut peneliti paparkan satu per satu:

1. Reduksi Data

Reduksi data menekankan pada pemfokusan data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Tujuan dari display data adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel. Berdasarkan langkah ketiga dalam analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

Hal ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui motif atau alasan yang mendorong masyarakat di dusun Erelembang, Kabupaten Gowa, untuk bergabung dalam program Perhutanan Sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan, khususnya pada konteks Perhutanan Sosial. Secara akademik, hasil penelitian ini menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang sosial kehutanan, terutama terkait kajian mengenai motif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Pengetahuan mengenai motivasi masyarakat untuk bergabung dalam skema Perhutanan Sosial dapat menjadi informasi yang berguna bagi instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Lingkungan



Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Kesatuan (PH), dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan seperti analisis sosial, wawancara, observasi, dan interpretasi data.

terlaksana di lapangan, peneliti juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan,

serta teori maupun literatur.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Mei 2025 hingga Juli 2025, yang terdiri atas dua tahapan utama, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2025, berlokasi di Desa Bontorannu, Dusun Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, tahap analisis data dilaksanakan pada bulan Agustus 2025, yang bertempat di Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamera digital, digunakan sebagai alat dokumentasi selama kegiatan di lapangan.
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan.
3. Perekam suara, digunakan untuk merekam percakapan saat proses wawancara berlangsung.
4. Laptop, digunakan untuk mengolah dan menganalisis data hasil wawancara

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner panduan wawancara, yang berfungsi sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun dan mengajukan pertanyaan secara sistematis kepada responden.

2.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan, teknik yang dilakukan dalam penelitian dengan melakukan peninjauan langsung terhadap permasalahan yang diambil (Amalina et al., 2017). Melalui observasi lapangan, diperoleh terkait kondisi wilayah HKM, bagaimana aktivitas masyarakat dalam mengelola lahan, bagaimana interaksi antaranggota KTH dengan pengurus, secara keseluruhan memahami konteks syarakat sesuai dengan kondisi nyata dilapangan.
- eknik Wawancara Terstruktur), wawancara terstruktur digunakan pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti rasi apa yang diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan penelitian telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-tulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan (Thalib,



2022). Wawancara terstruktur digunakan untuk menggali motif utama anggota PS dalam bergabung dan bertahan dalam HKm, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan kelembagaan HKm, serta alasan dibalik pilihan mereka terhadap kerja sama dengan mitra.

3. Studi Kepustakaan, salah satu metode penelitian kualitatif dimana tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumentasi lainnya sebagai bahan penelitian (Syafitri, 2020). Studi pustaka disini dipakai sebagai landasan teori dan pembandingan terhadap temuan yang didapatkan langsung di lapangan.

2.4 Populasi dan Sampel

Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 16 responden yang dimana mereka merupakan masyarakat yang tergabung sebagai anggota Perhutanan Sosial (KTH) di lokasi penelitian. Karena seluruh masyarakat merupakan anggota Perhutanan Sosial, maka perbedaan yang ingin dilihat bukan keikutsertaan dalam Perhutanan Sosial, melainkan peran dan posisi sosial di dalamnya.

Pemilihan sampel membagi responden menjadi dua kelompok: satu kelompok terdiri dari tokoh masyarakat (peninggi/pemuka dusun) dan satu lagi terdiri dari anggota masyarakat umum sebagai anggota dalam KTH disebut dengan Purposive Sampling dengan Stratifikasi (*Stratified Purposive Sampling*). *Purposive sampling* digunakan karena peneliti tidak mengambil responden secara acak, tetapi memilih orang-orang yang dianggap paling relevan dan mengetahui proses Perhutanan Sosial, pengelolaan KTH, serta kerja sama dengan mitra. Sedangkan, stratifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa perbedaan posisi sosial di dalam KTH juga terwakili, sehingga data tidak hanya berasal dari satu sudut pandang.

2.5 Sumber Data

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama (Pramiyati et al., 2017). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi masyarakat anggota perhutanan sosial.
2. Data Sekunder, data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan sumber lainnya (Harahap dan Tirtayasa, 2020). Data sekunder diperoleh dari literatur dan kebijakan yang digunakan untuk memperkuat analisis hasil lapangan. Disini diambil juga dokumen administrasi KTH.

